



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2011-2016



KABUPATEN SIAK



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tersusunnya Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2011-2016.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, kebijakan. Program dan kegiatan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Siak Sri Indrapura, April 2014

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**



YURNALIS, S.Sos,M.Si
NIP. 19710417 200212 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar tabel.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	2

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK

2.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Siak.....	4
2.2. Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab, Siak.....	5
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Siak.....	5
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Siak.....	6

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Keberagaman Suku Bangsa dan Agama	7
2. Aktivitas Ormas dan LSM Yang Meresahkan Masyarakat dan Pemerintah	11
3. Antisipasi Gerak Terorisme, Konflik Horizontal dan Kelompok Radikal...	12
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Siak.....	15
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	16
3.3. Telaahan Renstra Badan Kesbang dan Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau.....	18
3.4. Penentuan Isu – isu Strategis.....	19

BAB IV	VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK	
4.1	Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.....	21
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	21
4.3.	Strategi Dan Kebijakan.....	22
 BAB V	 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR.	
5.1.	Rencana program dan Kegiatan ,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	24
 BAB VI	 INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK	
6.1.	Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak	26



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2012 dan Perbub Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah Kabupaten Siak. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas berubah nomenklaturnya menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sudah beberap kali mengalami perubahan nomenklatur sebelum era reformasi, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Siak dilaksanakan oleh Kantor Sosial Politik dan sebahagian lagi dikerjakan oleh Kantor Hansip. Salah satu perubahan yang penting dari nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perubahan paradigma fungsi, yaitu fungsi pembinaan yang demban oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada masa lalu menjadi fungsi pemberdayaan dan fasilitas berbagai kegiatan sosial politik masyarakat, perwujudan kesatuan bangsa dan politik dan perlindungan masyarakat demi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan



Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Perda Nomor 52 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis Daerah Kabupaten Siak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra ini disusun sebagai acuan kerangka kerja dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak lima (5) tahun yang akan datang (2011 - 2016).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.
- 2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Riau.
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perda Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik .
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik .
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik .
 - d. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kantor;
 - e. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak terdiri dari :



1. Kepala Kantor;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa
4. Kepala Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik
5. Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah

2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak

Jumlah Pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak sebanyak 10 (Sepuluh) orang yang dapat dirinci berdasarkan latar belakang pendidikan.

No	Jabatan	Pangkat/ Gol	Pendidikan
1	Kepala Kantor	Pembina/ IVa	S2
2	Kasubbag Tata Usaha	Penata/ IIIc	S1
3	Kasi Kesatuan Bangsa	Penata TK.I / IIIId	S1
4	Kasi Fasilitas Infrastruktur Politik	Penata/ IIIb	S1
5	Kasi Kewaspadaan Daerah	Penata Muda TK.I/ IIIb	S1
6	Pelaksana	Penata Muda/ IIIa	S1 3 (Tiga) Orang
7	Pelaksana	Penata Muda/ IIIa	D3 1 (Orang)
8	Pelaksana	Pengatur Muda TK.I/ IIb	SLTA

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.

Pelayanan Publik (*public service*) yang diberikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak kepada masyarakat antara lain :

1. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);



2. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Partai Politik (Parpol);
3. Penerbitan Rekomendasi Riset.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak

Tantangan :

- a. Masih sangat kurangnya jumlah SDM;
- b. Masih kurangnya jumlah kuantitas pegawai;
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional, faximile, jaringan Internet foto copy, telepon dan lain-lainnya.

Peluang :

- a. Tingginya solidaritas pegawai;
- b. Meningkatnya disiplin pegawai;
- c. Tingginya minat penerapan pelayanan prima yang dilaksanakan oleh aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak kepada masyarakat yang mempunyai urusan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

1. Keberagaman Suku Bangsa dan Agama

Masyarakat Kabupaten Siak, apabila ditinjau dari konfigurasi suku bangsa dan agama dikategorikan sebagai masyarakat majemuk (*plural society*). Kabupaten Siak bisa juga disebut sebagai miniatur Indonesia, karena sebahagian besar suku bangsa di Indonesia terdapat di Kabupaten Siak, seperti Suku Melayu, Jawa, Batak, Minang, Bugis, Sunda, Betawi, Nias, Sakai, dan lain sebagainya terdapat di Kabupaten Siak. Selain itu, agama dan penganutnya yang terdapat di Kabupaten Siak terdiri dari Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu.



Tabel 3.1 : Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Agama

No	KECAMATAN	ISLAM %	KRISTEN %	KATHOLIK %	HINDU %	BUDHA %	KONGHU CU %	ALIRAN KEPERCAY AAN %	JUMLAH PENDUDUK
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8
1	SIK	21.351 0,92	690 0,03	43 0,00	1 0,00	1.102 0,05	- -	- -	23.187
2	SUNGAI APIT	26.747 0,93	668 0,02	12 0,00	7 0,00	1.201 0,04	163 0	84 0	28.882
3	MINAS	19.983 0,73	6.734 0,25	468 0,02	1 0,00	4 0,00	- -	25 0	27.215
4	TUALANG	87.580 0,80	17.917 0,16	2.137 0,02	36 0,00	1.524 0,01	- -	25 0	109.219
5	SUNGAI MANDAU	6.120 0,99	33 0,01	9 0,00	- -	- -	- -	- -	6.162
6	DAYUN	25.242 0,84	4.226 0,14	418 0,01	7 0,00	- -	- -	4 0	29.897
7	KERINCI KANAN	21.932 0,91	1.980 0,08	241 0,01	30 0,00	3 0,00	- -	- -	24.186
8	BUNGARAYA	23.198 0,98	302 0,01	87 0,00	12 0,00	45 0,00	- -	- -	23.644
9	KOTO GASIB	17.114 0,94	973 0,05	161 0,01	1 0,00	38 0,00	- -	- -	18.287
10	KANDIS	46.652 0,68	19.714 0,29	1.768 0,03	195 0,00	224 0,00	7 0	4 0	68.564
11	LUBUK DALAM	16.440 0,73	5.472 0,24	490 0,02	1 0,00	2 0,00	- -	42 0	22.447
12	SABAK AUH	11.894 0,96	207 0,02	77 0,01	1 0,00	247 0,02	- -	- -	12.426
13	MEMPURA	14.999 0,97	382 0,02	43 0,00	1 0,00	70 0,00	- -	- -	15.495
14	PUSAKO	5.506 0,96	164 0,03	40 0,01	- -	18 0,00	- -	- -	5.728
Jumlah Total		344.758 0,83	59.462 0,14	5.994 0,01	293 0,00	4.478 0,01	170 0	184 0	415.339

Sumber Dinas Kependudukan Kabupaten Siak



Keberagaman suku bangsa dan agama merupakan potensi konflik pada masa yang akan datang yang harus diwaspadai, sehingga diperlukan formulasi kebijakan-kebijan, baik pada tingkat nasional maupun daerah untuk mengantisipasi dan mengatasi terjadinya konflik suku bangsa dan agama. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006 - 2011) tidak terjadi konflik suku bangsa dan agama di Kabupaten Siak.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi terjadinya konflik suku bangsa di Kabupaten Siak, selama ini telah dilaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pemeliharaan harmonisasi dan kerukunan suku bangsa. Selain itu pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah membuat regulasi, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 mengamanahkan dibentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di provinsi dan kabupaten/kota.

Di Kabupaten Siak, FPK memang belum dibentuk karena beberapa organisasi paguyuban yang terdapat di Kabupaten Siak, belum melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Siak, khususnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Siak mengalami kesulitan memperoleh data tentang utusan perwakilan tokoh suku bangsa dari organisasi paguyuban tersebut yang duduk dalam FPK tersebut. Organisasi paguyuban yang belum melaporkan keberadaan oraganisasi paguyubannya adalah Jawa, Minang dan Batak. Pada tahun depan, yaitu tahun 2013 ditargetkan akan dibentuk FPK di Kabupaten Siak. FPK Kabupaten Siak diharapkan nantinya mampu membantu Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengantisipasi, mengatasi dan menyelesaikan konflik masyarakat yang disebabkan oleh pertikaian masalah suku bangsa.



Konflik masyarakat yang disebabkan oleh masalah agama, baik yang disebabkan oleh pemahaman maupun praktek penyelenggaraan amal ibadah suatu agama, baik yang terjadi dalam suatu agama maupun antar agama perlu pula diwaspadai. Dalam rangka menciptakan suasana kehidupan umat beragama yang rukun dan damai, khususnya Pemerintah Kabupaten Siak telah memfasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati Siak, layak tidaknya didirikan rumah ibadat oleh suatu umat agama.

FKUB Kabupaten Siak mulai dibentuk sejak tahun 2007 berdasarkan SK Bupati Siak Nomor: 243/ HK/ KPTS/ 2007 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Siak periode 2007-2010. SK ini diperbaharui dengan SK Bupati Siak Nomor : 269/ HK/ KPTS/ 2010 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Siak periode 2010-2014. SK Bupati ini diperbaharui lagi dengan SK Bupati Siak Nomor : 370/ HK/ KPTS/ 2010 Tentang perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor : 269/ HK/KPTS/ 2010 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Siak periode 2010-2014. FKUB Kabupaten Siak terdiri perwakilan atau utusan tokoh-tokoh agama sebanyak 17 orang dengan perincian : Islam 12 orang, Kristen 2 orang, Katholik 1 orang Budha 1 orang dan Hindu 1 orang. Sejak tahun 2007 sampai sekarang FKUB Kabupaten Siak telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terhitung mulai tahun 2007 sampai sekarang FKUB Kabupaten Siak telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak terjadi konflik umat beragama, khususnya dalam pendirian rumah ibadat.



2. Aktivitas Ormas dan LSM yang meresahkan Masyarakat dan Pemerintah

Sejak era reformasi bergulir sampai saat ini yang ditandai dengan diberikannya ruang kebebasan beraktivitas kepada infrastruktur politik, seperti partai politik, ormas, LSM dan kelompok masyarakat lainnya, terjadi peningkatan yang sangat pesat jumlah parpol, terutama ormas dan LSM, baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik yang melaporkan keberadaannya maupun yang tidak melaporkan keberadaannya kepada pemerintah, sehingga pemerintah mengalami kesulitan melakukan pendataan jumlah dan pengawasan terhadap aktivitas ormas dan LSM.

Di Kabupaten Siak sejak awal mula berdiri tahun 2011, terjadi pertumbuhan ormas dan LSM yang cukup pesat. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, setiap ormas dan LSM wajib memberitahukan keberadaannya kepada pemerintah. Namun tidak semua ormas dan LSM yang memberitahukan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Siak, sehingga sulit diketahui jumlah ormas dan LSM yang terdapat di Kabupaten Siak. Selain itu juga sulit dilakukan pengawasan terhadap aktivitas ormas dan LSM.

Pada tahun 2006 diterbitkan surat edaran Bupati Siak, dimana setiap ormas dan LSM yang akan menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Siak diwajibkan melampirkan surat keterangan terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Siak. Kebijakan ini secara langsung mengakibatkan setiap ormas dan LSM, jika ingin memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Siak, wajib melaporkan keberadaannya ke Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Siak.



Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, ada beberapa informasi lisan yang sampai ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak, yaitu adanya ormas dan LSM yang meresahkan masyarakat, seperti pungutan liar, pemerasan, melakukan fungsi audit dan pemeriksaan kepada instansi pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan, dana kelompok masyarakat (pokmas), dana biaya operasional sekolah (BOS) dan lain sebagainya. Aktivitas yang dilakukan ormas dan LSM ini, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Siak telah meresahkan dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

3. Antisipasi gerakan terorisme, konflik horizontal dan kelompok radikal.

Pemerintah Kabupaten Siak telah membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Siak terhitung mulai tahun 2007 sampai sekarang. Kominda dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah, Keanggotaan Kominda terdiri dari Dewan Pembina Bupati Siak (anggota). Ketua Kominda Distrik Militer 0303 Bengkalis (anggota) Kepala Kepolisian Resort Siak (anggota), Kepala Kejaksaan Negeri Siak (anggota). Ketua Kominda : Wakil Bupati Siak, Wakil Ketua : Kepala Seksi Intelijen Kodim 0303 Bengkalis dan Kasat Intelkam Polres Siak, Sekretaris Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak, anggota terdiri dari aparatur Pemerintah Kabupaten Siak dan aparatur Instansi Vertikal yang berkaitan bidang tugasnya dengan intelijen.

Tugas Kominda Kabupaten Siak adalah : merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen



dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas daerah. Kominda Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan SK Bupati Siak Nomor : 239/ HK/KPTS/ 2007 Tentang Pembentukan Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Siak Tahun 2007 yang diperbaharui dengan SK Bupati Siak Nomor 56/ HK/ KPTS/ 2008 Tentang Pembentukan Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Siak (SK terlampir).

POLA KERJA KOMINDA KABUPATEN SIAK

1. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi dilaksanakan sebanyak empat kali setahun membahas tentang permasalahan sosial, politik, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, baik yang telah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi termasuk antisipasi gerakan terorisme, konflik horizontal dan kelompok radikal.

2. Monitoring ke wilayah kecamatan

Monitoring dilakukan dalam rangka mengetahui ada tidak potensi permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu dan mengancam stabilitas sospol dan kamtrantibmas di wilayah Kabupaten Siak. Apabila dijumpai potensi masalah, akan dibahas dalam rapat koordinasi untuk direkomendasikan kepada Bupati Siak, supaya Bupati Siak dapat mengambil kebijakan terhadap permasalahan yang akan atau yang telah terjadi.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan atau potensi masalah sospol dan kamtrantibmas telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan SK Bupati Siak Nomor 15/



KPTS/ 2011 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Siak. Keanggotaan FKDM Kabupaten Siak terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain-lain. FKDM yang dibentuk di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. FKDM Kabupaten Siak mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menjaring, menampung, mengordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini Masyarakat

POLA KERJA FKDM KABUPATEN SIAK

1. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi FKDM dilaksanakan empat kali setahun. Rapat Koordinasi FKDM membahas potensi-potensi permasalahan kerawanan trantibmas dan penyakit masyarakat baik yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang maupun yang telah terjadi.

2. Monitoring kelapangan

Monitoring dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui ada tidaknya potensi konflik yang disebabkan oleh berbagai permasalahan dalam masyarakat, terutama potensi kerawan sosial politik (sospol), ketenteraman dan ketertiban masyarakat (trantibmas).



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.

3.1.1 Seksi Kesatuan Bangsa

- a. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai luhur Ideologi Pancasila;
- b. Adanya kecenderungan menurunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme warga masyarakat;
- c. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam merealisasikan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.
- d. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam merealisasikan mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan pribadi.

3.1.2. Seksi Fasilitasi Infra Struktur Politik

- a. Adanya informasi lisan tentang ormas dan LSM yang aktifitasnya meresahkan masyarakat;
- b. Masih adanya ormas dan LSM yang meresahkan masyarakat tetapi tidak memberitahukan keberadaannya;
- c. Adanya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ingin mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), namun tidak dikeluarkan karena menggunakan lambang negara sebagai lambang organisasinya;
- d. Masih ada Parpol yang beralamat sekretariat di luar Siak Sri Indrapura, sehingga menyulitkan koordinasi Pemerintah dengan parpol;
- e. Kantor sekretariat Parpol banyak yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya, seperti tidak dibuka pada jam kerja, sehingga menyulitkan koordinasi masalah surat menyurat.
- f. Tidak adanya laporan dari kelompok masyarakat, pemerintah kecamatan dan desa/lurah dan lain-lain yang melaporkan secara tertulis kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak tentang adanya ormas dan LSM yang



meresahkan serta mengganggu ketenteramn dan ketertiban masyarakat (trantibmas).

3.1.3 Seksi Kewaspadaan Daerah

- a. Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam penanganan gerakan masyarakat yang akan melaksanakan demonstrasi, misalnya informasi tentang akan adanya demonstrasi dari suatu kelompok masyarakat atau mahasiswa;
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya gerakan dari kelompok masyarakat tertentu yang bisa meresahkan dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, misalnya adanya kelompok pengajian yang cenderung menyalahkan mayoritas umat Islam lainnya;
- c. Kurangnya upaya pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan melakukan fungsi kontrol, monitoring dan pemantaun terhadap potensi kerawanan sospel dan trantibmas
- d. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam merealisasikan mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan pribadi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, cerdas dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu, serta mewujudkan pelayanan publik terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016



Misi : Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan;
2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan;
3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian perdesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.
4. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruangan dan perumahan.
5. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean governance and good governance*) serta menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan.



3.3 Telahaan Renstra Badan Kesbang dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Riau.

Visi

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Riau Tahun 2009-2013, maka Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Riau adalah " Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam suasana yang kondusif bagi kehidupan Politik yang demokratis di Propinsi Riau.

Misi

1. Memelihara semangat persatuan dan Kesatuan Bangsa didaerah
2. Mewujudkan kehidupan Politik demokratis yang ditopang oleh kelembagaan politik yang berdayaguna dan berhasilguna.
3. Menciptakan suasana yang kondusif yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Sejalan dengan visi dan Misi Badan Keatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Riau tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dirumuskan sebagai berikut:

1. Memantapkan rasa Nasionalisme dan meminimalisir potensidisintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka menopang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan politik dan demokrasi yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
3. Mempercepat pemulihan stabilitas sosial dalam kehidupan kemasyarakatan diwilayah konflik dan pasca konflik maupun sebagai akibat terjadinya bencana.



Berdasarkan penjabaran dari pernyataan tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa danPolitk dan Perlindungan Masyarakat Propnsi Riau menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2009-2013 sebagai berikut :

1. Mantapnya wawasan kebangsaan yang menopang kokohnya integrasi dan ketahanan bangsa didaerah maupun ketahanan Nasional;
2. Makin mantapnya sistem politik demokratis yang didukung oleh optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik kenegaraan;
3. Pulihnya penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan diwilayah konflik dan pasca komplik maupun daerah pasca bencana.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

- a. Munculnya kekuatan kelompok masyarakat yang mengorganisir diri mereka kedalam wadah ormas dan LSM yang memerankan fungsi pemerintah dan negara, misalnya fungsi pengawasan, audit, pemeriksaan dan lain-lain terhadap lembaga pemerintah;
- b. Adanya kelompok-kelompok pengajian, aliran-aliran keagamaan, khususnya Islam yang cenderung menyalahkan cara amal ibadah mayoritas umat Islam dan pemerintah. Apabila pemerintah dan aparat terkait tidak mampu mengantisipasi, menanggulangi dan mengatasinya di khawatirkan akan munculnya sel gerakan teroris dan kelompok radikal yang bisa mengganggu, membahayakan dan mengancam stabilitas trantibmas dalam masyarakat.
- c. Kemajemukan masyarakat Kabupaten Siak dari konfigurasi agama, suku bangsa tetap diperkirakan sebagai potensi konflik pada masa yang akan datang, sehingga perlu tindakan preventif



untuk menciptakan harmonisasi dan kerukunan umat bergama dan suku bangsa;

- d. Masih adanya timpang tindih antara lahan masyarakat dengan perusahaan perkebunan akan menimbulkan potensi permasalahan pada masa yang akan datang;
- e. Kurangnya sosialisasi ideologi bangsa dan negara bisa mengakibatkan krisis dan dekadensi moral anak bangsa terutama generasi muda yang semakin kehilangan jati diri sebagai bahagian terintegrasi bangsa dan negara.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK

4.1 Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Siak yang bersatu, harmonis, demokratis, partisipatif dan terciptanya suasana yang aman dan nyaman dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu.

Misi :

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan partisipatif.
3. Mewujudkan situasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak

Tabel IV. I
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengatasi dan mengantisipasi kasus instabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	50%	55%	65%	67%	55%



			Jumlah konflik yang bernuansa sara	2 Konflik	2 Konflik	1 Konflik	1 Konflik	1 Konflik
2	Terwujudnya implementasi Desentralisasi Politik	Terwujudnya implementasi Desentralisasi Politik	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	75%	75%	75%	75 %	75%

Sumber : Kantor Kesbang dan politik

4.3 Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

1. Melaksanakan penyuluhan, pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat tentang perlunya menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat yang harmonis, partisipatif dan saling hormat-menghormati antar suku bangsa dan umat beragama;
2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU Bidang Politik dalam rangka peningkatan pengetahuan politik masyarakat;
3. Menciptakan hubungan kemitraan yang sinergis antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik;
4. Menyelenggarakan pelatihan kepada aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak serta instansi terkait untuk meningkatkan pengetahuan dan kepekaan terhadap permasalahan AGHT Ipoeksosbud dan Kamtibmas;
5. Menyelenggarakan seminar, Talkshow, diskusi tentang wawasan kebangsaan;
6. Menyelenggarakan dialog tokoh masyarakat dan suku bangsa;
7. Menyelenggarakan kegiatan deteksi dini terhadap masalah sospol dan trantibmas;
8. Melakukan verifikasi dan pendataan ulang terhadap ormas dan LSM dalam rangka penyusunan data base ormas dan LSM;
9. Melaksanakan pelatihan deteksi dini kewaspadaan terhadap kerawanan sospol dan trantibmas di kalangan aparatur



Pemerintah Kabupaten Siak, yaitu aparaturnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak, aparaturnya pemerintah kecamatan dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

10. Melaksanakan pelatihan deteksi dini terhadap kerawanan soshopol dan trantibmas di kalangan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Siak dan kecamatan.

B. Kebijakan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak menerapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menciptakan hubungan yang komunikatif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh Pemuda dan lain-lain dalam rangka penciptaan stabilitas soshopol dan trantibmas;
2. Mendata ulang menertibkan Ormas dan LSM dengan cara memberlakukan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, agar ormas dan LSM mendaftarkan keberadaannya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
3. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan, pemberdayaan, sosialisasi kepada komponen masyarakat;
4. Mengoptimalkan pelatihan kepada aparaturnya pemerintah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta instansi terkait;
5. Menciptakan hubungan/relasi lintas sektoral dengan instansi terkait secara sinergis yang mempunyai hubungan tugas pokok dan fungsi dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak;
6. Melaksanakan monitoring terhadap situasi kerawanan sosial politik, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam wilayah Kabupaten Siak.



BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
JANGKA MENENGAH (2011-2016)
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI DAN MISI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIAK

Rencana program dan kegiatan jangka menengah selama lima tahun (2011-2016) yang disusun oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak tetap mengacu kepada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2011-2016. Selain itu juga mengacu kepada tugas pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012.

Selain rencana program dan kegiatan jangka menengah selama lima tahun (2011-2016) ini disusun pula berdasar kondisi objektif yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak, baik keadaan situasi kondisi permasalahan sospol dan trantibmas pada masa lalu, maupun proyeksi situasi kondisi permasalahan sospol dan trantibmas pada masa yang akan datang.



BAB VI

**INDIKATOR KINERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi dan mengatasi kasus instabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Jumlah konflik yang bernuansa sara;
3. Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada.

Tabel VI.1
Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengatasi dan mengantisipasi kasus instabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.		50%	55%	65%	67%	55%	
2	Jumlah konflik yang betnuansa sara		2 Konflik	2 Konflik	1 Konflik	1 Konflik	1 Konflik	
3	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada		75%	75%	75%	75 %	75%	

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Siak Tahun 2011-2016

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perencanaan (Tahun 2011)		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan (Tahun 2016)	
								Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
2					3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Urusan Wajib Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik															
Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	770.772.000,00	85%	1.083.294.880,00	87%	1.195.316.050,00	89%	1.288.521.100,00	95%	1.028.693.100,00	95%	1.597.589.600,00	95%	6.964.186.730,00
Terwujudnya Implementasi Desentralisasi Politik	Terwujudnya Implementasi Desentralisasi Politik		01.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jenis dan Jumlah Prangko, Materai dan Prangko surat	100%	11.100.000,00					85%	2.700.000,00	87%	2.700.000,00	87%	3.000.000,00	87%	19.500.000,00
					Materai 6000: 300 L Surat Kabar: 9 Eksemplar							Materai 6000: 300 L Materai 3000: 150 L		Materai 6000: 300 L Materai 3000: 150 L		Materai 6000: 300 L Materai 3000: 150 L		Materai 6000:1200 L Materai 3000:600 L	
			01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya listrik	Jumlah dan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	70%	6.000.000,00	90%	12.000.000,00	-				Pemasangan Internet dan Langganan Internet	20.880.000,00	90%	15.600.000,00	90%	54.480.000,00
			01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah petugas jasa adm keuangan						75%	36.000.000,00	80%	36.000.000,00	85%	36.000.000,00	85%	18.000.000,00	
										2 Orang	2 Orang			2 Orang	6 Orang				
			01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kebersihan yang diadakan	100%	2.143.000,00	75%	3.242.000,00	80%	3.096.000,00	85%	3.500.000,00	90%	3.500.000,00	100%	4.132.000,00	100%	19.613.000,00
						6 Jenis			4 Jenis	4 Jenis		5 Jenis	5 Jenis			24 Jenis			
			01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang di pelihara secara berkala	100%	13.900.000,00	75%	10.950.000,00	80%	12.550.000,00						80%	37.400.000,00	
						AC :8Unit komputer: 5 unit printer: 7 unit Mesin tik listrik :1 unit Pengisian Prioan: 8 Unit Mesin Tik: 4 Unit Service Laptop:5 Unit			AC :11 Unit komputer: 4 unit printer: 2 unit Mesin tik listrik :1 unit						AC :11 Unit komputer: 4 unit printer: 2 unit Mesin tik listrik :1 unit				
			01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor yang disediakan	90%	73.194.000,00	88%	99.172.880,00	90%	75.322.050,00	95%	84.383.100,00	98%	84.023.100,00	99%	90.297.600,00	99%	506.392.730,00
						34 Jenis			28 Jenis	30 Jenis	30 Jenis		122 Jenis						
01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	95%	46.060.000,00	85%	86.100.000,00	88%	41.500.000,00	90%	74.250.000,00	95%	74.250.000,00	95%	67.432.400,00	95%	389.592.400,00			
							7 jenis cetakan 1 Penggandaan	7 jenis cetakan 1 Penggandaan		7 jenis cetakan 1 Penggandaan		7 jenis cetakan 1 Penggandaan	28 Jenis Cetakan 4 Penggandaan						
01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	100%	2.145.000,00	80%	1.828.000,00	85%	1.228.000,00	88%	828.000,00	90%	828.000,00	95%	2.000.000,00	95%	8.857.000,00			
					8 Jenis						5 Jenis		13 Jenis						
01.13	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor - Pengadaan Laptop,Printer,PC - Pengadaan Mobiler	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	75%		80%	70.492.000,00	85%	157.100.000,00			88%	60.000.000,00	90%	70.000.000,00	90%	357.592.000,00			
						Laptop 1 unit Komputer PC 1 unit lemari arsip 1 unit		Notebok 2 unit printer 1 unit meja rapat 1 unit filing kabinet 1 unit Komputer 2 Unit camera 1 unit						Laptop 1 Unit Notebook 2 unit Printer 1 unit Meja rapat 1 unit filing kabinet 1 unit Komputer 3 Unit Camera 1 unit Lemari Arsip 1 Unit					

			01.15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100% 7 Eksemplar		9 Eksemplar	10.800.000,00	80% 9 Eksemplar	9.900.000,00	80% 9 Eksemplar	9.300.000,00	80% 9 Eksemplar	9.300.000,00	100% 9 Eksemplar	11.800.000,00	100% 52 Eksemplar	51.100.000,00
			01.17	Penyediaan Jasa Makan Dan Minuman	Jumlah pegawai yang disediakan makandan minum	85% 20 Orang	68.440.000,00	20 Orang	76.940.000,00	21 Orang	80.930.000,00	20 Orang	80.930.000,00	22 Orang	80.930.000,00	22 Orang	85.000.000,00	105 Orang	473.170.000,00
			01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Jumlah rapat dan konsultasi keluar daerah	40 Kali	441.410.000,00	50 Kali	523.790.000,00	69 Kali	583.830.000,00	93 Kali	732.630.000,00	93 Kali	474.062.000,00	93 Kali	887.757.600,00	398 Kali	3.643.479.600,00
			01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	2 Orang	36.000.000,00	2 Orang	36.000.000,00	2 Orang	36.000.000,00	2 Orang	36.000.000,00	2 Orang	36.000.000,00	2 Orang	36.000.000,00	2 Orang	216.000.000,00
			01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor	1 Orang	18.000.000,00	6 Orang	97.200.000,00	7 Orang	111.600.000,00	5 Orang	75.600.000,00	5 Orang	75.600.000,00	5 Orang	75.600.000,00	5 Orang	453.600.000,00
			01.22	Kunjungan kerja dan peninjauan lapangan dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dan peninjauan lapangan dalam daerah	100%	52.380.000,00	100 Kali	54.780.000,00	144 Kali	82.260.000,00	144 Kali	152.400.000,00	144 Kali	70.620.000,00	144 Kali	212.970.000,00	676 Kali	625.410.000,00
			02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana aparatur	70%	24.590.000,00	75%	339.475.000,00	80%	178.200.000,00	85%	70.160.000,00	88%	76.750.000,00	90%	381.500.000,00	95%	1.070.665.000,00
			02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin berkala	1 Unit Mobil Dinas Operasional	24.590.000,00	1 Unit Mobil Dinas Operasional	81.700.000,00	2 Unit Mobil Dinas Operasional	125.000.000,00	2 Unit Mobil Dinas Operasional	59.200.000,00	2 Unit Mobil Dinas Operasional	65.800.000,00	2 Unit Mobil Dinas Operasional	70.000.000,00	2 Unit Mobil Dinas Operasional	426.290.000,00
			02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan			1 Unit kendaraan roda 4	257.775.000,00	3 Unit kendaraan roda 2	53.200.000,00				1 Unit kendaraan roda 4		300.000.000,00	3 Unit Roda Empat 3 Unit Roda Dua	610.975.000,00
			02.30	Pemeliharaan rutin/peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	100%						Komputer 4 unit AC 11 Unit printer 2 unit Mesin tik listrik	10.950.000,00	Komputer 4 unit AC 11 Unit printer 2 unit Mesin tik listrik	10.950.000,00	Komputer 4 unit AC 11 Unit printer 2 unit Mesin tik listrik	11.500.000,00	Komputer 4 unit AC 11 Unit printer 2 unit Mesin tik listrik	33.400.000,00
			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	80%	15.450.000,00	84%	15.225.000,00	87%	13.600.000,00	90%	8.500.000,00	95%	6.800.000,00	98%	25.000.000,00	98%	84.575.000,00
			03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	17 stel	15.450.000,00	15 stel	15.225.000,00	Kopri 17 stel Batik 17 stel	13.600.000,00	PDH: 17 stel	8.500.000,00	17 stel	6.800.000,00	17 stel	25.000.000,00	17 stel	84.575.000,00
			07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan pengelolaan keuangan daerah	70%	33.450.000,00	75%	36.000.000,00	77%	36.000.000,00	80%	24.000.000,00	85%	11.000.000,00	90%	36.000.000,00	90%	176.450.000,00
			07.01	Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dan jenis jasa perawatan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.	90%	33.450.000,00	Checkup 2 kali Backup 2 kali Jasa restore 2 kali Jasa normalisasi 1 kali	36.000.000,00	Checkup 2 kali Backup 2 kali Jasa restore 2 kali Jasa normalisasi 1 kali	36.000.000,00	Checkup 2 kali Backup 2 kali Jasa restore 2 kali Jasa normalisasi 1 kali	24.000.000,00	Checkup 1 kali Backup 1 kali Jasa restore 1 kali Jasa normalisasi 1 kali	11.000.000,00	Checkup 1 kali Backup 1 kali Jasa restore 1 kali Jasa normalisasi 1 kali	36.000.000,00	Checkup 7 kali Backup 7 kali Jasa restore 7 kali Jasa normalisasi 5 kali	176.450.000,00
		Persentase partisipasi masyarakat dalam mengatasi dan mengantisipasi kasus instabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi dan mengatasi kasus instabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	80%	3.672.506.635,00	95%	876.515.000,00	55,5%	583.509.000,00	65%	1.258.902.000,00	77,3%	1.917.099.000,00	80%	2.604.876.000,00	80%	10.913.407.635,00
			15.01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Pemahaman Hubungan Antar Instansi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	75%	456.275.000,00	80%	254.050.000,00										710.325.000,00
			15.01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyamanan	Pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)		166.980.000,00	100%	197.625.000,00										364.605.000,00
			15.01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Kenyamanan Lingkungan (Operasional	Meningkatkan kinerja pengurus FKDM Kabupaten Siak			80%	149.210.000,00	90%	199.410.000,00	100%	232.430.000,00	100%	177.370.000,00	100%	239.250.000,00		997.670.000,00

			15.04	Pengendali kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masvarakat	Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap oerakan radikal dan teroris						90%	58.425.000,00	100%	58.425.000,00	100%	58.425.000,00	100%	175.275.000,00	
			15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Penyediaan perlengkapan pakaian linmas pemilukada Kab.Siak Tahun 2011	2400 stel baju linmas	2.223.565.000,00											2.223.565.000,00	
			15.06	Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Terciptanya sinergisitas KPU dan Pemda Kab.Siak	90%	599.056.635,00											599.056.635,00	
			15.07	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tugas Intelijen berdasarkan Permendagri No 11 Tahun 2006 dan Nomor 16 tahun	95%	197.030.000,00	95%	242.080.000,00	95%	220.214.000,00	95%	230.564.000,00	95%	238.005.000,00	95%	275.000.000,00	95%	1.402.893.000,00
			15.08	Kegiatan Hari ulang Tahun (HUT) linmas	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah tentang Penyelenggaraan Peran dan Tugas Linmas	88%	29.600.000,00	100%	33.550.000,00								100%	63.150.000,00	
			15.09	Penyiapan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peserta mengetahui strategi penggalan, penguasaan dan penanganan dan				60 org	163.885.000,00	60 org	177.605.000,00	131 Orang	286.200.000,00	60 org	300.000.000,00	87%	927.690.000,00	
			15.12	Operasional Tim terpadu penanganan gangguan keamanan	Pencegahan dini, cegah tangkal terhadap AGHT, Ipoleksosbud dan Kamtibmas						90%	231.210.000,00	90%	199.910.000,00	90%	300.000.000,00	90%	731.120.000,00	
			15.	Pelatihan pencegahan dini dalam rangka penyelesaian konflik keamanan dan ketertiban masvarakat	Terwujudnya pencegahan dini dalam rangka penyelesaian konflik keamanan dan ketertiban masvarakat								80%	450.000.000,00	85%	450.000.000,00	85%	900.000.000,00	
			15....	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terseleenggaranya pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing								80%	175.000.000,00	85%	200.000.000,00	85%	375.000.000,00	
			15..13	Tim monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu	Terciptanya stabilitas politik pada penyelenggaraan Pileo dan Pilores						80%	328.668.000,00			85%	450.012.000,00		778.680.000,00	
			15...	Pelatihan pencegahan unjuk rasa dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan masvarakat	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban								Tokoh masyarakat	332.189.000,00	100%	332.189.000,00	100%	664.378.000,00	
		Jumlah konflik yang bernuansa sara	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Konflik Bernuasa Sara	1 Konflik	0,00	3 Konflik	320.060.000,00	2 Konflik	0,00	1 Konflik	375.145.000,00	1 Konflik	871.975.000,00	95%	870.000.000,00	97%	2.437.180.000,00
			17.02	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masvarakat	Meningkatkan wawasan kebangsaan terhadap Ormas dan LSM di Kabupaten Siak			95%	159.710.000,00			95%	200.775.000,00	95%	183.830.000,00	95%	200.000.000,00	95%	744.315.000,00
			17.03	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terbentuknya Forum Pembauran kebangsaan (FPK) di Kab. Siak			90%	160.350.000,00				90%	160.000.000,00	90%	160.000.000,00	100%	480.350.000,00	
			17.36	Sosialisasi empat pilar kebangsaan	Terwujudnya masyarakat yang cinta Pancasila UUD 1945, Bhinika Tunggal Ika dan NKRI						80%	174.370.000,00	85%	165.000.000,00	85%	170.000.000,00	85%	509.370.000,00	
			17..	Pelatihan dasar Bela Negara	Terciptanya rasa nasionalisme dan patriotisme dikalangan generasi muda								70%	202.965.000,00	75%	170.000.000,00	85%	372.965.000,00	

			17...	Sosialisasi Nilai Kebangsaan	Menyebarkan dan menanamkan rasa kebangsaan dan							100 org	160.180.000,00	85%	170.000.000,00	90%	330.180.000,00		
			171	Seminar: Talk Show: diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	terciptanya Pemuda cerdas dan terampil dalam pelestarian pengamalan pancasila KET : Pindah							89%		90%		90%	0,00		
			18	Program Kemitraan Pengembangan	Jumlah Konflik Bernuasa Sara	75%	127.677.500,00	80%	163.700.000,00	84%	361.225.000,00	87%	156.225.000,00	%	196.115.000,00	%	170.000.000,00	87%	1.174.942.500,00
			18.01	Kegiatan Fasilitasi Pencapaian halaqoh dan berbagai dforum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya Harmonisasi dan Kerukunan Hidup Suku Bangsa			80%	361.225.000,00	85%	156.225.000,00	90%	196.115.000,00	95%	170.000.000,00	90%	883.565.000,00		
			18.02	Seminar: Talk Show: diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Terciptanya Pemuda cerdas dan terampil dalam pelestarian pengamalan	84%	127.677.500,00	86%	163.700.000,00							90%	291.377.500,00		
		Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada	80%	71.155.000,00	85%	260.050.000,00	90%	646.665.000,00	95%	300.110.000,00	96%	657.610.000,00	97%	721.390.000,00	97%	2.656.980.000,00
			21.01	Penyuluhan Kepada mas	Masyarakat mengetahui dan mempedomani undang-undang politik dan dapat mengimplementasinya			80%	184.560.000,00	85%	413.500.000,00	88%		90%	330.720.000,00	90%	436.050.000,00	90%	1.364.830.000,00
			21.03	Kegiatan Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemilu				98%	183.045.000,00		199.770.000,00	90%	226.240.000,00	99%	185.000.000,00	99%	794.055.000,00	
			21.05	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan PP No 5 Tahun 2009 dan Permendagri No 24 Tahun 2009	90%	71.155.000,00	90%	75.490.000,00	90%	50.120.000,00	90%					90%	196.765.000,00	
			21.05	Fasilitasi Penyaluran Bantuan keuangan partai politik Ket: Penyesuaian Nama Kegiatan Monev	Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan PP No 5 Tahun 2009 dan Permendagri No 24 Tahun 2009					80%	100.340.000,00	85%	100.650.000,00	90%	100.340.000,00	90%	301.330.000,00		
			22	Program pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban bencana	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Korban Bencana		0,00	70%	255.275.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	70%	255.275.000,00
			21.05	Orientasi Manajemen Linmas	Anggota linmas mendapatkan pengetahuan dasar kantiemas dan peraturan baris berbaris			90%	123.225.000,00								90%	123.225.000,00	
			21.07	Pelatihan Dasar (latsar) tenaga linmas	Masyarakat mengetahui gejala, tanda-tanda bencana dan melakukan upaya penyelamatan ancaman terhadap ancaman bahaya bencana			90%	132.050.000,00								90%	132.050.000,00	
JUMLAH						100%	4.715.601.135,00	100%	3.349.594.880,00	100%	3.014.515.050,00	100%	3.481.553.100,00	100%	4.766.042.100,00	100%	6.406.355.600,00	100%	25.733.661.865,00

Siak sri indapura, 21 Januari 2014
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK



YURNALIS,S.Sos.M.SI
NIP. 19710417 200212 1 006